

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (Studi Kasus Penganekaragaman
Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2019)**

Oleh : Hidayatika

Dosen Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In order to ensure the availability of food for the community, the Regional Government of the Meranti Islands Regency through the Food Security, Food Crops and Animal Husbandry Service of the Meranti Islands Regency implements the 2019 Food Diversification and Community Nutrition Improvement policy. The purpose of the research carried out is to describe the implementation of the Food Security and Nutrition Policy in Meranti Islands Regency in an effort to diversify food and improve public nutrition in 2019. The research method used is qualitative research. This type of research is descriptive qualitative. In data collection the writer uses interview and documentation techniques. The results of the study indicate that the implementation of the Food Security and Nutrition Policy in the Meranti Islands Regency in the efforts of Food Diversification and Community Nutrition Improvement in 2019 has not been well implemented. The inadequate implementation of the policy is due to the low intensity of policy program implementation in terms of quantity and quality and has not been able to reach the majority of the people of the Meranti Islands Regency. The response of the Regional Government of the Meranti Islands Regency and the people of the Meranti Islands Regency in responding to the Food Security and Nutrition policy in the Meranti Islands Regency in the 2019 Food Diversification and Community Nutrition Improvement policy has not provided a good response to the implementation of these activities. The Regional Government of the Kepulauan Meranti Regency prioritizes the allocation of funding in the regional infrastructure development sector. Socialization of Food Diversification and Community Nutrition Improvement has not been carried out continuously, because of the limited infrastructure and human resources that handle food and nutrition and the lack of funding budget channeled by the Regional Government of the Meranti Islands Regency towards the implementation of this policy.

Keywords: Policy Implementation, Food Security and Nutrition

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.¹

Namun sebuah kebijakan atau program tidak akan berarti apa-apa kalau tidak diimplementasikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Udoji dalam Wahab bahwa “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.”²

Pelaksanaan pembangunan sektor pangan harus dilaksanakan sesuai potensi sumberdaya daerah, kapasitas lokal dan juga harus memperhatikan kendala dan permasalahan ketahanan pangan di masing-masing daerah maka untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas dalam penyelenggaraan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data literatur tentang ketersediaan Energi dan Protein berdasarkan neraca bahan Makanan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 belum seimbang. Data Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan

Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut yang akan dijelaskan pada tabel 1.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017

Kontri busi pangan	Ketersediaan		
	Energi (kal/ka p/hr)	Protein (Gr/Ka p/Hr)	Lemak (Gr/Ka p/Hr)
Nabati	1992,43	56,84	30.63
Hewan	384,87	26,82	418.62
Total	2377,3	83,66	449.25

Sumber: Neraca Bahan Makanan Kabupaten Meranti Tahun 2018³

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi terdapat kelebihan/surplus di atas angka kecukupan gizi (2.400 kkal) yaitu sebesar 2377.3 Kkal/kap/hr. Sedangkan angka ketersediaan protein juga tetap di atas angka anjuran yaitu 83.66 gram/kap/hari. Hal ini menunjukkan bahwa Kontribusi energi dari kelompok pangan hewani cenderung lebih banyak daripada kelompok pangan dari nabati. Begitu juga ketersediaan protein, kontribusi tertinggi terdapat pada hewani dari pada kontribusi pangan nabati.

Sementara itu Komposisi ketersediaan pangan berdasarkan pengelompokan Pola Pangan Harapan tahun 2017 setiap kelompok pangan berdasarkan NBM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini sebagai berikut:

¹ Pada Pasal 28 c Undang-Undang Dasar 1945

² Wahab, Solichin A. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 125

³ Neraca Bahan Makanan Kabupaten Meranti Tahun 2018

Tabel 1.2.
Data Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) dan Skor Maksimal
Kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2017

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH	Skor Maks	Ket.
1.	Padi-padian	25,0	25,0	+
2.	Umbi-umbian	2,5	2,5	+
3.	Pangan Hewani	23,4	24,0	+
4.	Minyak dan Lemak	0,3	5,0	+
5.	Buah/biji berminyak	-	1,0	+
6.	Kacang-kacangan	10,0	10,0	+
7.	Gula	2,5	2,5	+
8.	Sayuran dan buah	30,0	30,0	+
9.	Lain-lain	-	-	+
Jumlah		93,72	100	

Sumber: *Neraca Bahan Makanan Kabupaten Meranti Tahun 2018*

Penilaian komposisi ketersediaan pangan tahun 2017 diindikasikan dengan skor PPH. Dari hasil penghitungan PPH sebagaimana yang disajikan diatas dapat digambarkan bahwa skor PPH yang dicapai oleh Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017 sebesar 93,70.

Dalam tabel PPH tersebut menunjukkan bahwa Keragaman ketersediaan pangan belum ideal karena masih ada beberapa kelompok bahan makanan yang belum mencapai skor yang diharapkan seperti pada kelompok pangan hewani dengan skor 23,4 sedangkan skor maksimal 24. Minyak dan Lemak dengan skor 0,3 sedangkan skor maks 5, Kelompok Buah / Biji berminyak 0 dengan skor maksimal 1.

Permasalahan berikutnya yang dialami Kabupaten Kepulauan Meranti adalah masalah rendahnya nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) skala nasional yang dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian yang menempatkan Kabupaten Kepulauan

Meranti pada peringkat 379 dari 416 Kabupaten yang ada di Indonesia.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik melakukan peneliti mengenai “Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Penganekaragaman Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2019)”.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metoda kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya.⁵

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari penelitian ini sendiri yang menjadi informan guna memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian serta dokumentasi yang menjadi pendukung penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

⁴ Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2018 oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Tahun 2018

⁵ Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan,,: Rineka Cipta. Jakarta Hal: 23

sampai tuntas, sehingga datanya jenuh, (Moleong, 2011:248).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Pemberdayaan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan program pemberdayaan kepada pengemis di wilayah Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menerapkan empat pola pemberdayaan antara lain :

- a. Bimbingan Mental,
- b. Bimbingan Ketertiban,
- c. Bimbingan Keagamaan dan
- d. Bimbingan Wirausaha dan Keterampilan.

Berdasarkan hasil penelitian dari masing-masing indikator dan sub indikator implementasi kebijakan tersebut akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan sub indikator Kepentingan Yang Mempengaruhi (*Interest Affected*) diketahui bahwa: pelaksanaan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP) Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Dinas dan badan serta organisasi kemasyarakatan lainnya di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan cara melaksanakan rapat koordinasi, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi program serta pengadaan lomba Festival Pangan Lokal. Hal ini disebabkan karena Dinas Ketahanan Pangan,

Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP) Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mesti bekerja sama dengan berbagai pihak agar kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terselenggara dengan baik.

2. Berdasarkan sub indikator Jenis Manfaat Yang Dihasilkan (*Type of Benefits*), diketahui bahwa manfaat dilaksanakannya kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti masih tergolong dalam wilayah dengan angka Stunting Balita yang tinggi (1170 orang) atau 12% dari total jumlah Balita se Kabupaten Kepulauan Meranti. Disamping itu pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP) Kabupaten Kepulauan Meranti belum dirasakan manfaatnya bagi sebahagian besar masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pelaksanaan program tersebut baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih minim dan belum mampu menyetuh sebahagian besar masyarakat/Kelompok Tani ataupun wilayah Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Permasalahan ini

pada akhirnya mengakibatkan konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh jenis pangan impor atau yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dimana harganya sangat mahal dan juga pada saat-saat tertentu, ketersediaanya sangat terbatas.

3. Berdasarkan sub indikator Derajat Perubahan Yang Diinginkan (*Extent of Change Envision*) diketahui bahwa derajat perubahan yang diinginkan dari dilaksanakannya kebijakan penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat supaya mengkonsumsi pangan yang lebih beragam dengan mutu gizi yang lebih baik serta meningkatkan produksi bahan pangan lokal yang sesuai dengan kondisi alam serta kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Meranti agar tercapai skor Pola Pangan Harapan dan peningkatan Skor Indek Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Kepulauan Meranti yang diinginkan. Namun berdasarkan data statistik skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Skor Maksimal Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui bahwa keragaman ketersediaan pangan belum ideal karena masih ada beberapa kelompok bahan makanan yang belum mencapai skor yang diharapkan. Begitu juga mengenai skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih

rendah dengan nilai IKP sebesar 48,94. Data ini menunjukkan bahwa, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Kepulauan Meranti masih rendah, menempati peringkat ke 12 (peringkat terakhir) dari seluruh kabupaten Kota yang ada Provinsi Riau. Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa derajat perubahan yang diinginkan dari dilaksanakannya kebijakan penganekaragaman pangan dan peningkatan gizi masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan baik.

4. Berdasarkan sub indikator Pelaksana Program (*Program Implementer*), diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan para petugas pelaksana sudah melaksanakannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari setiap program kegiatan dengan baik. Namun begitu pelaksanaan kebijakan Penganekaragaman Pangan dan peningkatan Gizi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti belum terselenggara dengan baik diakibatkan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - 1) Keterbatasan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan dan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang kurang memadai demi tersekenggaranya program kebijakan
 - 2) Luasnya jangkauan atau jarak tempuh dari masing-

- masing kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti minimnya sarana transportasi yang ada karena jarrak tempuh dari masing masing kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak semua nya dapat ditempuh dengan jalan darat dan mesti menggunakan sarana transportasi laut
- 3) Rendahnya tingkat pemahama masyarakat dalam menerapkan teknologi pertanian serta pemanfaatan lahan dan perkarangan.
 - 4) Topografi sebahagian besar wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah pesisir tidak mendukung terhadap pengembangan beberapa jenis tanaman pangan dan holtikultura
 - 5) Pola hidup masyarakat dalam kegiatan ekonomi sebahagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang dan melayan dan tidak menekuni bidang pertanian
5. Berdasarkan sub indikator Sumber-Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*) diketahui bahwa ketersediaan jumlah petugas dalam kegiatan tersebut tidak mencukupi untuk mengcover wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat ini Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP) Kabupaten

Kepulauan Meranti hanya memiliki satu orang petugas yang menangani bidang penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat. Dengan jauhnya jarak tempuh wilayah perkecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti ini maka keterbatasan jumlah petugas tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan dan perbaikan gizi masyarakat. Disamping itu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP) Kabupaten Kepulauan Meranti mengharapkan adanya dukungan armada transportasi laut yang dapat digunakan setiap saat untuk melakukan kegiatan ataupun kunjungan kerja kesetiap pelosok wilayah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan indikator Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dalam implementasi kebijakan Penganekaragaman Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019 belum terlaksana dengan baik. Tidak terselenggaranya kebijakan tersebut dengan baik karena dari 6 sub indikator Isi Kebijakan (*Content of Policy*) yang dianalisis diketahui bahwa wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti masih tergolong dalam wilayah dengan angka Stunting Balita yang tinggi (1170 orang) atau

12% dari total jumlah Balita se Kabupaten Kepulauan Meranti. Pelaksanaan program tersebut baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih minim dan belum mampu menyetuh sebahagian besar masyarakat/Kelompok Tani ataupun wilayah Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Skor Maksimal Kabupaten Kepulauan Meranti belum ideal karena masih ada beberapa kelompok bahan makanan yang belum mencapai skor yang diharapkan. Masih rendahnya nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar 48,94 dimana Kabupaten Kepulauan Meranti menempati peringkat ke 12 (peringkat terakhir) dari 12 Kabupaten Kota yang ada Provinsi Riau. Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa derajat perubahan yang diinginkan dari dilaksanakannya kebijakan penganekaragaman pangan dan peningkatan gizi masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan baik.

6. Berdasarkan sub indikator Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*) diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya penganggaran pendanaan

yang disalurkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Disamping itu berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP) Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai *leading sector* pelaksana kebijakan seperti keterbatasan sarana prasaran pelaksanaan kebijakan, keterbatasan sumberdaya manusia yang membidangani pangan dan gizi serta minimnya anggaran pendanaan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah terhadap kebijakan tersebut mengakibatkan implementasi kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan dan perbaikan gizi melalui kegiatan sosialisasi, pemberdayaan, pendampingan serta pelaksanaan berbagai lomba ketahanan pangan. Namun berbagai kegiatan tersebut belum terselenggara dengan dengan baik. Hal ini disebabkan karena kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak kontiniu dan tidak mampu menjangkau seluruh wilayah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan tidak kontiniunya kegiatan ini maka

menyebabkan pesan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, tidak dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

7. Berdasarkan sub indikator Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution an regime characteristic*) diketahui bahwa kebijakan pangan dan perbaikan gizi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dianggap bukan merupakan skala prioritas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya penganggaran pendanaan yang disalurkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Disamping itu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP) Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai *leading sector* pelaksana kebijakan memiliki keterbatasan sarana prasarana pelaksanaan kebijakan, keterbatasan sumberdaya manusia yang membidangi pangan dan gizi serta minimnya anggaran pendanaan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah terhadap kebijakan tersebut. Dengan permasalahan dan keterbatasan yang dialami, mengakibatkan implementasi kebijakan pangan dan perbaikan gizi masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan data statistik

diketahui bahwa hingga tahun 2019 wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak berdasarkan persentase jumlah penduduk di Provinsi Riau yaitu sebanyak 490,72 ribu orang atau 7,08% dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Meranti.

8. Berdasarkan sub indikator Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*) diketahui bahwa tingkat kepatuhan para pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan kebijakan pangan dan perbaikan gizi masyarakat sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari disiplin para petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dengan komitmen yang tinggi dari masing-masing pegawai dengan sepenuh hati dalam melaksanakan tugasnya. Pelayanan yang diberikan juga sangat disiplin dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan indikator Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*) dalam implementasi kebijakan Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019 diketahui bahwa implementasi kebijakan tersebut belum terlaksana dengan baik. Tidak terselenggaranya kebijakan tersebut dengan baik disebabkan karena kegiatan sosialisasi

yang dilakukan tidak kontiniu dan tidak mampu menjangkau seluruh wilayah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Disamping itu, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP) Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai *leading sector* pelaksana kebijakan memiliki keterbatasan sarana prasaran pelaksanaan kebijakan, keterbatasan sumberdaya manusia yang membidangani pangan dan gizi serta minimnya anggaran pendanaan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan data statistik diketahui bahwa hingga tahun 2019 wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak berdasarkan persentase jumlah penduduk di Provinsi Riau yaitu sebanyak 490,72 ribu orang atau 7,08% dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Meranti

SIMPULAN

1. Implementasi kebijakan panganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019 berdasarkan analisis Isi Kebijakan (*Content of Policy*) belum terselenggara dengan baik. Tidak baiknya penyelenggaraan kebijakan tersebut disebabkan karena intensitas pelaksanaan program kebijakan baik dari segi kuantitas ataupun kualitas masih rendah dan belum mampu menyetuh sebahagian besar masyarakat/Kelompok Tani ataupun wilayah Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Perubahan yang diinginkan dari dilaksanakannya kebijakan yaitu

panganekaragaman pangan dan peningkatan gizi masyarakat belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan data statistik Kabupaten Kepulauan Meranti hingga tahun 2019 diketahui bahwa 1170 orang atau 12% dari total jumlah Balita se Kabupaten Kepulauan Meranti menderita *stunting* atau kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis. Begitu juga dengan nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar 48,94 dimana dengan nilai tersebut, Kabupaten Kepulauan Meranti menempati peringkat ke 12 (peringkat terakhir) dari 12 Kabupaten Kota yang ada Provinsi Riau. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Skor Maksimal Kabupaten Kepulauan Meranti belum ideal karena masih ada beberapa kelompok bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum mencapai skor yang diharapkan. Implementasi kebijakan panganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019 berdasarkan analisis Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*) belum terlaksana dengan baik. Tidak terlaksananya kebijakan tersebut dengan baik disebabkan karena kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP) Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai *leading sector* pelaksana kebijakan tidak kontiniu dan tidak mampu menjangkau

seluruh wilayah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan karena keterbatasan sarana prasarana dan sumberdaya manusia yang membidangani pangan dan gizi serta minimnya anggaran pendanaan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan data statistik diketahui bahwa hingga tahun 2019 wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak berdasarkan persentase jumlah penduduk di Provinsi Riau yaitu sebanyak 490,72 ribu orang atau 7,08% dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Meranti.

DAFTAR RUJUKAN

Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2018 oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Tahun 2018

Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan,,: Rineka Cipta. Jakarta

Neraca Bahan Makanan Kabupaten Meranti Tahun 2018

Undang-Undang Dasar 1945

Wahab, Solichin A. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.